

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan sesuku di Lubuk Basung dilakukan dengan dua cara, pertama perkawinan di bawah tangan dan perkawinan yang dicatatkan di pencatatan pernikahan di KUA. Untuk nikah di bawah tangan penyelesaian permasalahan terlebih dahulu dilakukan dalam kaum. Jika permasalahan berkaitan perkawinan tersebut telah selesai, maka perkawinan dapat diisbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Agam. Namun, dalam permohonan *isbat* para pelaku tidak mencantumkan sesuku sebagai alasan dalam pengajuan permohonan. Untuk proses secara sah dalam Hukum Nasional, maka sama proses perkawinannya sama dengan perkawinan lainnya. Di Sumatera Barat yang mempunyai hukum adat Minangkabau melibatkan mamak *pusako* dalam proses pelaksanaan perkawinan. Sehingga, pelaksanaan perkawinan sesuku dapat dilaksanakan sepanjang adanya surat persetujuan dari mamak *pusako*. Perkawinan sesuku ini dilakukan dengan perpindahan suku atau kaum.

Proses yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Lubuk Basung adalah diawali dengan persetujuan dari *mamak pusako* berdasarkan kesepakatan kaum yang dibuktikan dengan surat persetujuan *mamak pusako*. Dari surat ini kemudian dilanjutkan dengan surat pengantar dari jorong. Kedua surat ini kemudian diserahkan ke Wali Nagari Lubuk Basung. Dari kantor Wali Nagari Lubuk Basung kemudian dibuat surat pengantar nikah NT-N4 untuk dibawa ke KUA Kecamatan Lubuk Basung. Pada tingkat KUA Kecamatan Lubuk Basung dilakukan pendaftaran nikah dengan melakukan pembayaran untuk akad nikah. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di KUA

dilaksanakan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA sebagai tempat pelaksanaan akad. Untuk pernikahan di luar KUA dilakukan setoran ke BANK dilanjutkan dengan penyerahan slip setoran KUA dan pemeriksaan calon pengantin dan wali hakim. Setelah syarat administrasi terpenuhi maka pernikahan dapat dilakukan secara sah.

2. Penerapan sanksi dalam pelanggaran kawin sesuku ini sudah longgar di Nagari Lubuk Basung. Faktanya di lapangan para pelaku kawin sesuku hanya membayar uang tebusan sebagai bentuk perpindahan suku ataupun kaum. Sedangkan sanksi sosial berupa buang *bilah* tidak diterapkan secara penuh didalam masyarakat. Hal ini terlihat di lapangan, bahwa beberapa pasangan kawin sesuku masih melakukan kegiatan sosial didalam masyarakat dan masih bertempat tinggal di tanah ulayat kaum.
3. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perkawinan sesuku tidak menghilangkan hak istri atau perempuan dalam memperoleh harta *pusako tinggi*. Mereka masih dapat mempergunakan tanah ulayat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kedudukan anak dan haknya dalam kewarisan harta *suarang* juga tidak hilang, karena para pelaku tetap menjadi ahli waris. Hal ini terlihat di lapangan, para pelaku kawin sesuku masih mendapatkan pembagian harta *suarang*. Sanksi buang *bilah* atau sepanjang adat tidak menyebabkan anak kehilangan kedudukan didalam keluarga. Anak atau pasangan kawin sesuku tetap menjadi bagian dari *nuclear family* atau keluarga inti.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau yang menganutsistem perkawinan *eksogami*. Eksistensi larangan kawin ini adalah kawin pantang, dimana Islam tidak mengenal larangan kawin ini tetapi dalam Adat Minangkabau tidak boleh dilaksanakan. Hal ini terlihat bahwa keharusan dalam melakukan

perkawinan di luar kekerabatan *matrilineal* tidak diterapkan secara mutlak. Dalam artian, adanya peluang untuk melakukan suatu perkawinan dengan kerabat dalam garis *matrilineal* sepanjang disetujui oleh kaum dan Mamak Adat atau *pusako* melalui musyawarah mufakat.

Faktor-faktor ini disebabkan karena adanya pengaruh Islam di Minangkabau yang bersesuaian dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, faktor pertambahan jumlah masyarakat yang memicu pemekaran suku dan kaum, faktor migrasi yang lazim dikenal dengan merantau serta faktor *asimilasi* penduduk. Sehingga meluasnya ranji yang menyebabkan tidak jelasnya asal-usul. Sehingga timbul kecenderungan untuk membentuk keluarga inti atau *nuclear family*.

Berkaitan dengan perkawinan ini erat hubungannya dengan kekerabatan di Minangkabau. Dalam hal pembagian waris harta perkawinan di Minangkabau, terlihat bahwa pelaksanaan perkawinan sesuku tidak menyebabkan hilangnya kedudukan anak dan hak dalam pewarisan. Sehingga ini sangat erat berhubungan dengan surat keterangan waris yang dikeluarkan notaris. Tidak hanya berkaitan dengan surat keterangan waris, dalam hal ini notaris dapat memahami kedudukan seorang pelaku kawin sesuku dalam hal penguasaan tanah ulayat. Hal ini terlihat dalam pengurusan sertipikat tanah ulayat. Karena para pelaku pada prinsipnya adalah bagian dari anggota kaum sebagai ahli waris. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi notaris terhadap kedudukan para pelaku dalam proses penerbitan sertipikat tanah ulayat terutama dalam hal penetapan ranji.

B. Saran

- a. Para ninik mamak, ulama maupun cendikiawan yang disebut dengan *tigo tungku sajarangan* harus mengkaji ulang kembali hukum adat ini, agar ke depan tidak ada

perbedaan pandangan pola pikir dan pandangan terhadap perkawinan. Karena perkawinan adalah sunnatullah yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pemahaman bagi generasi muda terhadap aturan ini

- b. Para *tigo tungku sajarangan* diharapkan dapat merumuskan kompilasi hukum adat agar tidak terjadi benturan dengan aturan lainnya di masyarakat
- c. Pemerintah diharapkan lebih cermat dalam memfasilitasi para *tigo tungku sajarangan* untuk merumuskan ketentuan adat yang masih dapat dipertahankan dan yang harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Agar tujuan sebuah hukum dapat tercapai dengan baik

